

PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR

H. Mustafa Hasbar *)

Abstract : Formal Sector represent the sector which play role important in good Indonesia economics in this time and also in a period to coming because easy in character entered the easy to enter the. The important role shown by fact that informal sector in Indonesia in the year 2005 permeating more or less 60 percentage of entire all labor force in Indonesia. This number consistently can be perceived from year to year may even exist tendency to go up. microly is its his important is informal sector role can be perceived from ability of Cloister Merchant (PKL) provide the goods and service which cheap relative so that can be accessed by society widely especially from economic faction lower. But, the mentioned cannot meniadikan view which is leaving for each other the back cause the government of Town Makassar have to take the policy having the character of to duplicate the (Double Standard). In one side of Pemetintah Town do conduct the construction to informal sector and make hay through retribution for example, but on the other side Town Government also conduct the enjojment and dissipating of because damage reason of town image and police the public. This matter have caused the informal sector is angle;corner on course which marginal always pulled over and always become in trouble Set Of Police of Pamong District public service.

Keyword : Cloister Merchant

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang terjadi dan meluas menjadi krisis multi dimensi yang melanda Negara kita sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan dampak yang amat besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Dampak yang paling menonjol dari krisis ini adalah :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat kemiskinan
2. Meningkatnya jumlah pengangguran
3. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar
4. Rendahnya daya beli masyarakat dan
5. Stabilitas keamanan terganggu.

Kota Makassar, sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah masuk kategori kota metropolitan, juga tidak terlepas dari imbas krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang sampai saat ini belum juga pulih.

Kota makassar yang terdiri dari 14 kecamatan 143 kelurahan, dengan luas wilayah 175,77 km persegi, dihuni oleh kurang lebih 1.193.451 penduduk, yang terdiri dari laki-laki sebesar 582.579 dan penduduk perempuan sebesar 610.872. jumlah penduduk kota makassar terjadi

perbedaan antara siang hari dan malam hari. Jumlah penduduk pada siang hari lebih banyak dibanding dengan pada malam hari, hal ini diakibatkan banyaknya tenaga kerja/buruh yang bekerja dikota makassar, berasal dari daerah ttangga, seperti Gowa, Takalar dan Maros.

Eksistensi Kota Makassar, sebagai kota metropolitan yang secara langsung terkena imbas terhadap krisis ekonomi, membuat masyarakat, baik yang sudah berdomisili di Makassar sendiri maupun dari daerah lainnya mengadukan nasibnya, dengan mencari nafkah dikota ini, baik secara formal maupun non formal.

Urbanisasi yang terjadi berimplikasi pula terhadap kondisi stabiisasi keamanan dan keindahan kota makassar. Sebagian besar pendatang (urbanisasi) yang masuk kota makassar, melakukan usaha-usaha non formal dengan jalan membuka usaha-usaha kecil-kecilan, yang banyak menghiasi sepanjang jalan-jalan dan pasar-pasar di kota makassar. Usaha-usaha mereka dikategorikan sebagai PEDAGANG KAKI LIMA (PKL). Selain dari para urban, penduduk lokal juga berusaha membuka usaha-usaha yang masuk kategori PKL tersebut.

Kemunculan pedagang kaki lima ini didasari pada tiga factor, yaitu:

1. Urbanisasi
2. Kemiskinan
3. Kurangnya lapangan kerja formal

Sebagai kota metropolitan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar semakin meningkat dan tidak terkendali. Pertumbuhannya yang begitu cepat dan semakin meningkat, telah mengisi bahkan mengkooptasi ruang-ruang publik dan pusat-pusat kegiatan masyarakat, sehingga kini di Kota Makassar nyaris tak ada ruang yang bebas dari Pedangan Kaki Lima alias PKL. Sehingga tidaklah mungkin berlebihan bila kita katakan bahwa “Makassar Kota Harapan PKL”. Ungkapan ini tidaklah berlebihan, karena sepanjang ruas-ruas jalan, baik jalan-jalan protokol, jalan-jalan biasa lainnya, sekitar pusat perbelanjaan, pusat-pusat pertokoan, sekitar gedung-gedung pemerintahan, sekita kampus, sekita tempat-tempat rekreasi dan lokasi-lokasi lainnya kita pasti menjumpai yang namanya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebagai gambaran, pada 2000 jumlah PKL di Kota Makassar tercatat hanya kurang lbih 2.500 , itu pun hanya ada di pusat kota. Lima tahun berikutnya yaitu pada tahun 2005 jumlah itu bertambah menjadi kurang lebih 5.000 PKL. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2006, jumlahnya mengalami peningkatan menjadi kurang lebih 6.000 an dan pada awal tahun 2007 melonjak menjadi kurang lebih 7.000 PKL yang menyebar di semua kecamatan se Kota Makassar (Hasil Wawancara dengan Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, pada tanggal 4 dan 5 Juli 2007).

Sudah banyak protes, keluhan, bahkan umpatan, dari warga kota atas keberadaan PKL, karena kehadirannya sudah “menguasai” ruang-ruang publik dan seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas, pejalan kaki, menutup saluran drainase/got-got serta sering sebagai tempat keributan. (karena banyak tempat PKL sebagai tempat menjual minuman keras,

sejenis Ballo dan sejenisnya serta tempat bermuat mesum). Selain itu, tenda, gerobak dan alat lainnya para Pedagang Kaki Lima menambah kekumuhan wajah kota, karena para PKL cenderung tidak memperhatikan aspek estetika, kebersihan lingkungan dan keindahan, serta keamanan kota.

Meskipun permasalahan yang berkaitan dengan Pedangan Kaki Lima kelihatannya rumit dan susah untuk dibenahi/diberantas, ada harapan bagi pemerintah kota Makassar untuk menggali Sumber Dana dari Pedagang Kaki Lima tersebut secara optimal melalui kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*).

PERNYATAAN MASALAH

Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja di dari berbagai sektor dan semakin banyaknya tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan (banyaknya jumlah pengangguran). Kegagalan pembangunan ekonomi perkotaan telah menyebabkan kapasitas penyerapan angkatan kerja pada sektor formal menjadi terbatas. Dipihak lain kebijaksanaan ekonomi yang tidak kompetitif terhadap sektor industri usaha kecil dan menengah khususnya diluar sector pertanian. Akibatnya terjadi pengangguran di pedesaan yang meningkat dan kemudian mereka bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan.

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar cukup besar dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Kendati tiap tahun pemerintah kota melalui dinas social dan Satpol Polisi Pamong Praja melakukan penggusuran dan diusir dari pusat kota, tapi setiap itu pula, setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Sepanjang hari kita lihat bagaimana Pedagang Kaki Lima (PKL)

menghiasi dan bermunculan serta berjejeran ke badan jalan sampai memacetkan arus lalu lintas di seluruh kawasan di Kota Makassar, tak terkecuali di kawasan jalan-jalan protokol/jalan utama meliputi Jalan HOS Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. Kajaolalido, Jl. Cenderawasih, Jl. Masjid Raya, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A.P. Pettarani, Jl. Sultan Alauddin, Jl. Hertasning, Jl. Pengayoman, Jl. Toddopoli Raya, Jl. Dr. Ratulangi, yang menjado favorit dan bagian dari tujub titik penertiban. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski di satu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Berbagai upaya dilakukan Pemkot Bandung untuk menertibkannya. Namun, upaya itu nyaris tak membuahkan hasil optimal, karena persoalan PKL berdimensi luas. Melihat betapa kompleksitas permasalahan PKL di Kota Makassar ini maka dibutuhkan sebuah kerangka kebijakan yang komprehensif antara pemerintah, swasta/pengusaha, LSM, koperasi ataupun sector-sector terkait lainnya untuk mengelola PKL menjadi sebuah gerakan ekonomi yang mampu menyangga perekonomian nasional.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berikut ini adalah pilihan kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola PKL:

1. Merangsang PKL untuk membentuk koperasi atau kalau sudah ada harus menjadi anggota. Pandangan yang berkembang diantara PKL adalah bahwa dengan masuk menjadi anggota koperasi berarti berkurang penghasilannya. Untuk itu perlu ditawarkan program-program baru yang dilakukan dengan ditawarkan program-program baru yang dilakukan dengan syarat PKL harus masuk menjadi anggota koperasi. Program-program tersebut antara lain memberikan pinjaman dengan suku bunga kecil dan pengembangan pemasaran barang. Pengadaan kredit dengan persyaratan yang mudah dan bunga rendah diharapkan dapat membantu menambah modal bagi PKL. Pengembangan pemasaran barang dilakukan dengan memberi kesempatan PKL untuk mengikuti pameran perdagangan tanpa dipungut bayaran. Koperasi adalah penganjangan tangan dari pemerintah untuk dapat menciptakan acara-acara pameran. Bagi PKL terbaik akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pameran dengan cakupan yang lebih luas lagi yaitu nasional maupun Internasional.
2. Pemerintah sebaiknya melegalkan saja kegiatan PKL ini karena terbukti telah memberikan sumbangan yang besar. Peran serta pemerintah dilakukan melalui penataan lokasi usaha, bentuk tempat usaha, penyediaan tempat berjualan dan penyediaan fasilitas yang mendukung seperti kamar mandi. PKL dipungut sejumlah uang tertentu untuk biaya perawatan. Disamping itu pemerintah melalui koperasi berkewajiban untuk menjamin ketertiban dan keamanan berusaha warga PKL. Hal ini dilakukan agar dapat mereduksi persepsi negative mengenai keberadaan PKL.
3. Pemerintah membuka *link* atau jalur antara pengusaha besar (sector formal) dengan pengusaha kecil (sector informal) agar pekerja sector informal dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah.
4. Melakukan “profesionalisasi” PKL, PKL dimodali, ditata dan dikelola secara profesional agar tercipta suasana kota yang tertib. Contohnya PKL di daerah tertentu menggunakan pakaian dan tempat berdagang sama/seragam dengan warna tertentu. Hal ini akan menarik minat wisatawan berbelanja dan menjadi daya tarik pariwisata daerah tertentu. Penyeragaman PKL suatu daerah akan memperlihatkan perbedaan antara PKL legal dan illegal. Koperasi/pemerintah tetap membolehkan adanya PKL musiman dengan menciptakan syarat-

syarat yang jelas seperti daerah untuk berdagang. Maksudnya adalah agar tercipta keadilan antara PKL ilegal dan legal.

5. Pelatihan bagi PKL dengan kerjasama antara LSM, PT, Koperasi. Sikap dan derajat keusahawan pelaku sector informal, misalnya sikap optimisme, kejelasan tujuan dan strategi serta pendekatan untuk mencapai tujuan, dan memanfaatkan peluang yang mereka miliki ternyata masih cukup rendah. Selain hal itu dalam melakukan kegiatannya, pekerja sector informal kurang dalam memahami dasar-dasar pengelolaan usaha (*basic management skill*) dan juga tentang pemasaran. Keterkaitan dan kemitraan antara pelaku sector informal dan usaha formal yang bersifat trasformatif dalam hal meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan perluasan pasar sangat diperlukan untuk mengembangkan sumber daya. Pengembangan sumber daya dapat dengan penyuluhan, penyebaran informasi seputar kegiatan usaha, pengembangan wawasan, penggalakan pembukuan dalam usaha, yang semua itu dapat dilakukan lewat pendidikan atau pelatihan.
6. Perlunya Perda tentang Kebijakan pengembangan kawasan/kegiatan perdagangan yang terkait dengan penataan PKL itu antara lain meliputi pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha kali lima serta pembinaan kegiatan usaha kali lima agar secara bertahap mampu berdagang tanpa memanfaatkan ruang public. Dari arah kebijakan itu, jelas tergambar apa yang seharusnya dilaksanakan. Selain program relokasi sebagai upaya penertiban PKL. Untuk merelokasi PKL harus mengetahui karakteristik PKL di masing-masing wilayah artinya dalam melaksanakan relokasi harus berbasis komunitas diadakan dialog mencari pemecahan masalah dengan prinsip “win-win solution”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Walaupun eksistensi/keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mengundang kontroversi, tetapi ternyata sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ekonomi suatu daerah. Pentingnya keberadaan Pedagang Kaki Lima antara lain adalah menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daya beli berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengembangkan semangat kewirausahaan dan mendukung pariwisata.

Kebijakan pemerintah yang melarang keberadaan sektor informal justru berpotensi menimbulkan kerawanan politik. Terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan siktor ini di daerah perkotaan, pemerintah perlu membuat alternatif kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti Koperasi, LSM, Swasta/Pengusaha, Pemerintah dan Orgasisasi-organisasi yang dibentuk oleh PKL.

DAFTAR RUJUKAN

- Arham, M. Amier dkk, 2007, *Dinamika Kebijakan Publik, Potret Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*: Pustaka Indonesia Press, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2006, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006
- Badan Pusat Statistik (BPS), Makassar Dalam Angka berbagai Edisi
- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Mahsum, Mohammad, 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik, untuk Negara-Negara*

***Berkembang, Model-Model
Perumusan, Implementasi, dan
Evaluasi,*** Elex Media
Komputindo, Jakarta.

....., 2006, ***Analisis
Kebijakan,*** Elex Media Komputindo

* Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan
Pendidikan **Nobel Indonesia** Makassar